

ABSTRAK

Pemilu memainkan peran penting dalam proses rotasi kekuasaan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terakumulasi dalam satu tangan atau kelompok untuk jangka waktu yang Panjang. Franz Magnis Suseno, adalah seorang akademisi yang sejak awal meyoroti pelanggaran etika berat dalam proses Pilpres ini. Bagi Franz Magnis suseno legitimasi pemilu melibatkan lebih dari sekadar legitimasi hukum, melainkan dengan memperhatikan juga penilaian kualitatif dari segi moral dan etika. Kepatuhan hukum adalah salah satu aspek, tetapi tidak menjamin bahwa pemilu akan dianggap adil dan sah secara moral. Dalam sidang sengketa Pilpres di MK Franz Magnis Suseno menegaskan ada beberapa poin pelanggaran etika serius dalam Pilpres 2024. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami gagasan etika Franz Magnis Suseno dalam menyikapi Pilpres serta menganalisis posisi dan peran Franz Magnis-Suseno dalam konteks ruang publik dengan menggunakan kerangka konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas.

Metode penelitian menggunakan analisis teks Hermeneutika Hans Georg Gadamer melalui konsep "penggabungan cakrawala" (*fusion of horizons*). Artinya dalam proses membaca dan memahami teks Franz Magnis ini akan melibatkan dialog serta pembentukan sintesis antara tiga aspek: dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Selain itu, tinjauan komunikasi akan mengacu pada konsep ruang publik menurut Jürgen Habermas.

Habermas membagi ruang publik menjadi dua wilayah: informal dan formal. Dari sini akan dikaji posisi Franz Magnis baik dalam ruang public formal yaitu dalam persidangan MK dan ruang public informal yakni masyarakat luas, agar terbangun diskursus public yang rasional (masyarakat yang argumentatif) Dari hasil penelitian teks tersebut Franz Magnis menekankan bahwa etika merupakan norma tertinggi yang melampaui hukum positif. Etika digunakan sebagai alat untuk memantau dan memberi penilaian terhadap produk hukum. Keadilan bukan sekadar soal prosedur hukum yang bersifat legalitas semata, melainkan harus menyentuh substansi kebenaran yang berpijak pada pedoman etis dalam kehidupan bernegara.

Kata kunci: Franz Magnis, Etika, Pilpres, MK

ABSTRACT

Presidential Elections play an important role in the process of power rotation to prevent power from accumulating in the hands of one individual or group for an extended period. Franz Magnis Suseno, an academic, has consistently highlighted serious ethical violations in the Presidential Election process. According to Franz Magnis Suseno, the legitimacy of elections involves more than just legal legitimacy; it also takes into account qualitative assessments from moral and ethical perspectives. Legal compliance is one aspect, but it does not guarantee that an election will be considered fair and morally legitimate. In the Presidential Election dispute hearings at the Constitutional Court, Franz Magnis Suseno emphasized several points of serious ethical violations in the 2024 Presidential Election. The purpose of this study is to analyze and understand Franz Magnis Suseno's ethical ideas in addressing the Presidential Election and to analyze his position and role within the public sphere using the public sphere concept framework proposed by Jürgen Habermas.

The research method uses Hans Georg Gadamer's Hermeneutic text analysis through the concept of "fusion of horizons." This means that the process of reading and understanding Franz Magnis Suseno's text will involve dialogue and the formation of a synthesis between three aspects: the world of the text, the world of the author, and the world of the reader. Additionally, the communication review will refer to Jürgen Habermas's concept of the public sphere.

Habermas divides the public sphere into two areas: informal and formal. From this, Franz Magnis's position will be examined in both the formal public sphere, such as in the Constitutional Court trial, and the informal public sphere, namely the wider society, in order to develop rational public discourse (an argumentative society). Based on the research of this text, Franz Magnis emphasizes that ethics is the highest norm that transcends positive law. Ethics is used as a tool to monitor and assess legal products. Justice is not just about legal procedures based on legality; it must also touch the substance of truth based on ethical guidelines in state life.

Keywords: Franz Magnis, Ethics, Presidential Election, Constitutional Court.